



KPKNL  
KISARAN

# LAPORAN KINERJA

## 2024

---

KPKNL KISARAN



## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	5
BAB I PENDAHULUAN .....	7
A. Umum.....	7
B. Tugas dan Fungsi.....	7
C. Struktur Organisasi KPKNL Kisaran.....	8
D. Isu dan Peran Strategis .....	10
E. Sistematika Laporan .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	13
A. Rencana Strategis .....	13
B. Perjanjian Kinerja.....	14
C. Pengukuran Kinerja .....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	22
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV PENUTUP .....	25

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah Yang Maha Kuasa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2024.

Laporan Kinerja disusun sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 dilakukan berdasarkan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja KPKNL Kisaran, Berdasarkan data IKU Kernerkeu Three pada KPKNL Kisaran Tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Kisaran adalah sebesar 104,95 % dari 11 Sasaran Strategis (SS) dengan total 20 IKU.

Berbagai pencapaian kinerja tahun 2024, tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya, dukungan peningkatan kompetensi, sistem informasi manajemen yang terintegrasi serta sinergi yang terjalin dengan baik dengan seluruh pihak-pihak terkait. Selain itu, KPKNL Kisaran juga terus melakukan perbaikan sarana prasarana dan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja serta memberikan layanan kepada seluruh stakeholder dengan melakukan perbaikan secara terus menerus dan motto layanan CINTA (Cepat, Inovatif, Normatif, Transparan dan Adaptif).

Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat dan capaian kinerja yang telah ditetapkan, serta menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan umpan balik bagi langkah perbaikan di masa mendatang dan mendorong kami untuk berupaya meningkatkan kinerja KPKNL Kisaran.



Kisaran, 31 Januari 2025  
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik  
Melly Maiesta

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), perlu diterapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang terdiri dari prinsip/asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2024 terhadap Kontrak Kinerja KPKNL Kisaran yang terdiri dari 11 Sasaran Strategis (SS) dan 20 IKU, sebanyak 17 IKU berstatus hijau, 1 IKU berstatus kuning, dan 2 IKU berstatus merah dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,95%. Pencapaian target dan realisasi IKU tahun 2024 secara ringkas diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Tanpa Batas
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	52,33%	52,33%
	1b-CP	Indeks integritas organisasi	89,17	92,44	103,67%
Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%	76,78%	107,38%
	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%	100,00%	115,61%
Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	92,24%	92,24%
	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%	257,52%	257,52%
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	99,95	133,27%
Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	73,17%	73,17%

	5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	127,05%	127,05%
Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	71%	56,52%	120,39%
	6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%	131,25%	147,47%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%	0,00%	200,00%
	7b-N	Persentase Capaian Hasil Survei Data Properti	100%	120,00%	120,00%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	85	97,32	114,49%
	8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	113,63%	126,25%
Pengelolaan keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	120,00	120,00%
	9b-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10	0%	200,00%
	9c-N	Tingkat Penguatan manajemen BMN dan Pengadaan	100%	120%	120,00%
Komunikasi publik yang efektif	10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	100,00	125,00%
Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-CP	Indeks efektivitas UKI	82	99,10	120,85%

Penjabaran terkait Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KPKNL Kisaran akan tergambar pada setiap bab dalam Laporan Kinerja ini.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Umum

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu unit di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai peran strategis dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Peran dan tugas yang diamanahkan kepada DJKN tersebut dilaksanakan secara *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran sebagai salah satu instansi vertikal yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara juga bertanggungjawab menyusun LAKIN Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban KPKNL Kisaran dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Berikut ini gambaran umum dari KPKNL Kisaran sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang meliputi tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi dan peran strategis KPKNL Kisaran.

## B. Tugas dan Fungsi

KPKNL Kisaran merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Adapun tugas dan fungsi KPKNL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 adalah melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara.
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara.
3. Pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
5. pelaksanaan pelayanan penilaian
6. pelaksanaan pelayanan lelang

7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala KPKNL Kisaran senantiasa berpegang teguh pada visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

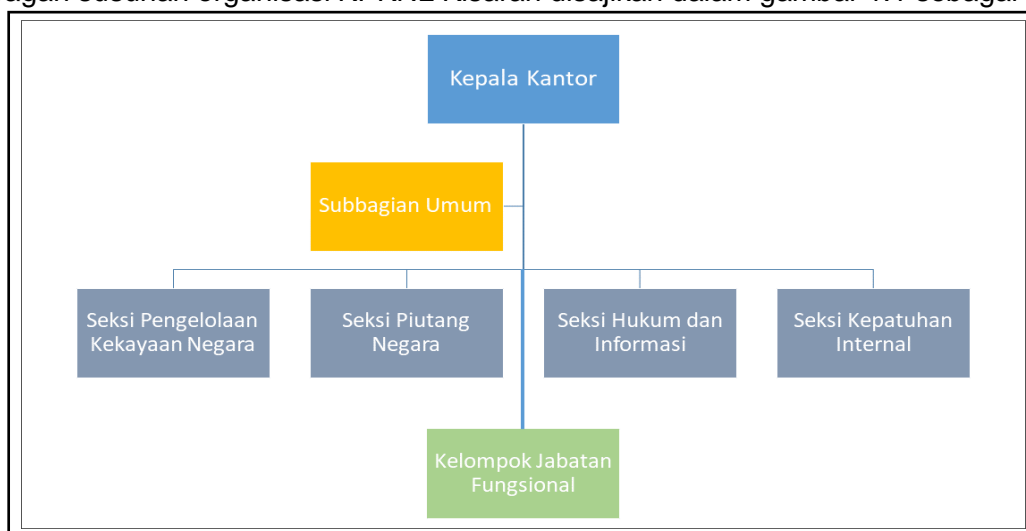
**“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”**

### C. Struktur Organisasi KPKNL Kisaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, susunan organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terdiri dari:

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
3. Seksi Piutang Negara
4. Seksi Hukum dan Informasi
5. Seksi Kepatuhan Internal
6. Kelompok Jabatan Fungsional

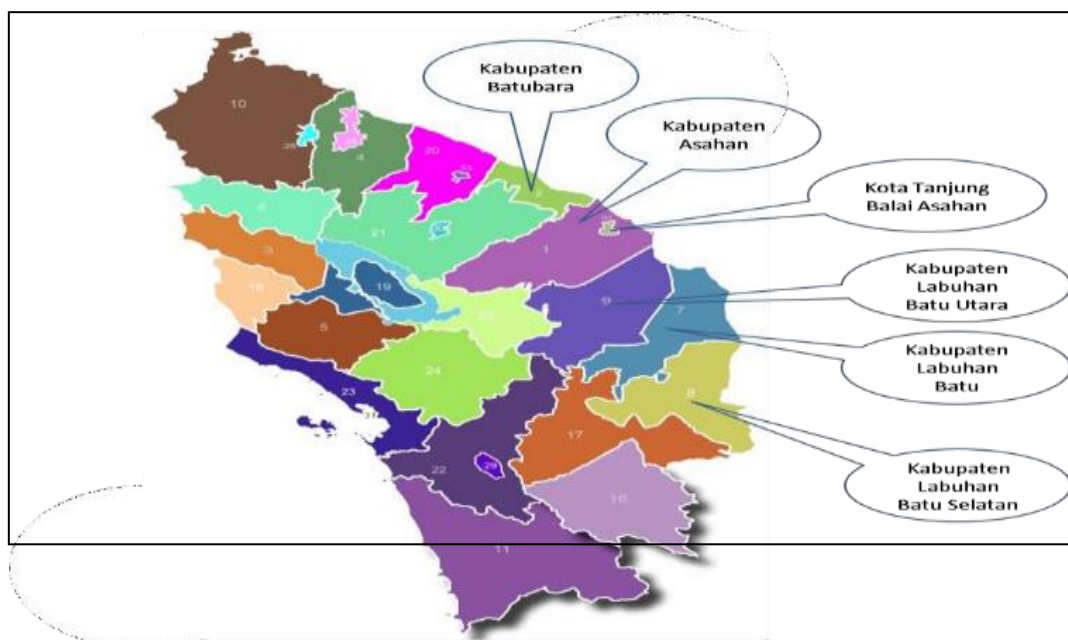
Bagan susunan organisasi KPKNL Kisaran disajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut.



Gambar 1.1  
Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran

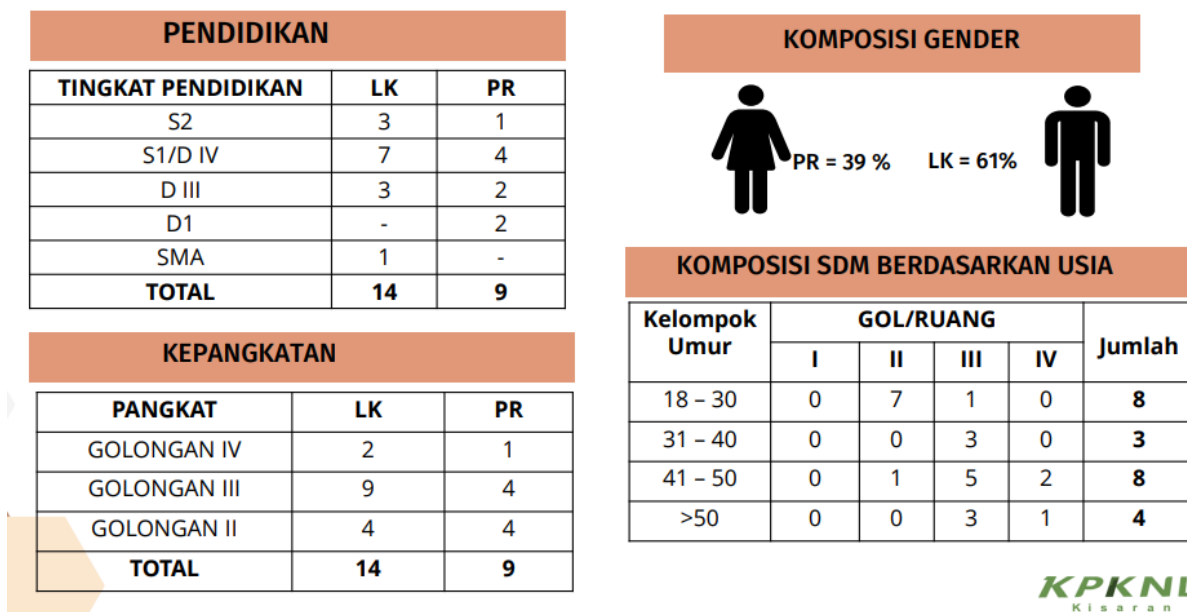
Wilayah kerja KPKNL Kisaran KPKNL Kisaran terdiri dari 1 (satu) kota dan 5 (lima) kabupatenyaitu:

1. Kabupaten Asahan
2. Kabupaten Labuhanbatu Utara
3. Kota Tanjungbalai
4. Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5. Kabupaten Labuhanbatu
6. Kabupaten Batubara



Gambar 1.2  
Peta Wilayah Kerja KPKNL Kisaran

KPKNL Kisaran didukung oleh 24 orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, akuntansi, manajemen, hukum, dan lainnya. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat jabatan, golongan, pendidikan, dan gender adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3

Komposisi Pegawai KPKNL Kisaran Berdasarkan Jabatan dan Golongan

#### D. Isu dan Peran Strategis

Sebagai organisasi yang memiliki fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang, KPKNL Kisaran memiliki peran strategis sebagai berikut:

##### a. Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai pengelola kekayaan Negara, KPKNL Kisaran turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna terutama difokuskan pada pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. Selain itu KPKNL Kisaran selaku asset manager mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam peningkatan pendapatan negara dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

##### b. Penilaian

Penilaian terhadap Kekayaan Negara yang merupakan langkah awal dari proses pengelolaan kekayaan negara setelah dilakukan inventarisasi dilakukan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Tugas penilaian kekayaan negara meliputi kegiatan standarisasi, bimbingan teknis, analisis, supervisi, evaluasi dan rekomendasi dibidang penilaian. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Kegiatan penilaian dilakukan untuk kepentingan pengambilan keputusan pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN. Dengan demikian pengelolaan kekayaan negara menjadi optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

**c. Pelayanan Lelang**

Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik bertungsi sebagai akta van transport untuk kepentingan peralihan hak. DJKN dinarapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam "mindset" masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Setelah berlakunya PMK Nomor 90/PMK 06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran Secara Tertulis Tapa Kenadiran Peserta Lelang Melalui Internet, lelang dapat dilaksanakan tanpa kehadiran peserta lelang. Hal ini tentu saia semakin memudahkan siapa saja untuk ikut menjadi peserta lelang.

**d. Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pembiayaan APBN**

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh KPKNL Kisaran adalah penerimaan yang berasal dari pemanfaatan BMN. Biaya Administrasi (Biad) Pengurusan Piutang Negara merupakan hasil dan pelayanan pengurusan piutang negara yang diterima oleh KPKNL. Sedangkan dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL memperoleh hasil berupa Bea Lelang. Kedua instrumen penerimaan tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## **E. Sistematika Laporan**

### **1. Ringkasan Eksekutif**

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta langkah antisipatifnya

### **2. Bab I. Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **3. Bab II. Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2024.

### **4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja**

#### **a. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja KPKNL Kisaran untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian

target kinerja;

- 3) Menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 4) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 5) Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 6) Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
- 7) Rencana aksi ke depan

#### **b. Realisasi Anggaran**

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja KPKNL Kisaran sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **5. Bab IV. Penutup**

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja KPKNL Kisaran serta langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada tahun 2024 yang akan datang.

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Dalam melaksanakan perencanaan kinerja, KPKNL Kisaran berpedoman pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020. Rencana strategis tersebut memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan digunakan untuk mengantisipasi kondisi masa depan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan. KPKNL Kisaran memiliki visi yang sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 yaitu:

**'Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat'.**

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Kisaran menetapkan misi seperti yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan pengelolaan kekayaan negara.
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Penjabaran atas misi tersebut ditetapkan dalam suatu bentuk tujuan yang memiliki korelasi dengan misi yang telah dinyatakan sebelumnya. Tujuan KPKNL Kisaran sebagaimana tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
- b. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
- c. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
- d. Birokrasi dan layanan public DJKN yang agile, efektif, dan efisien;

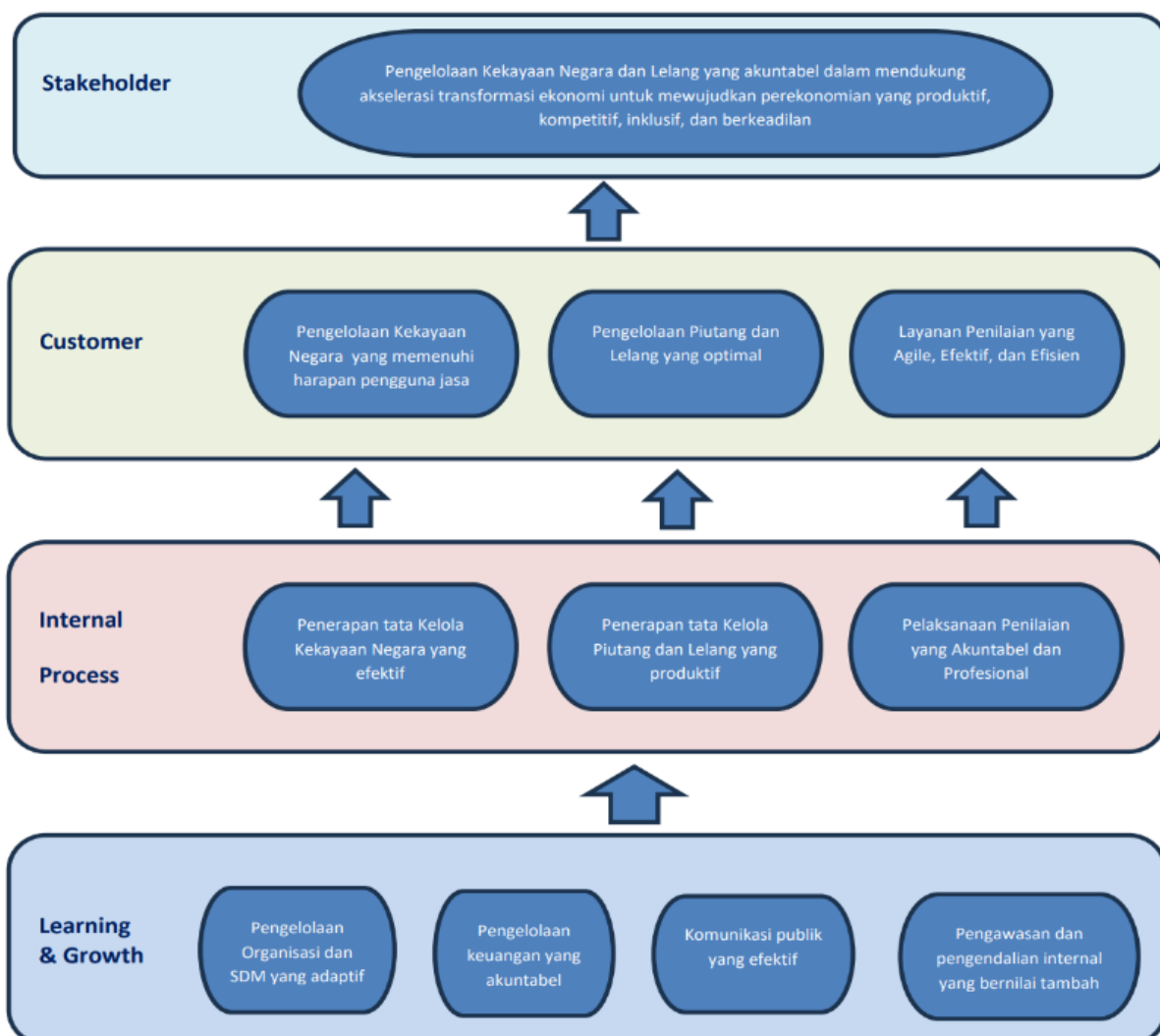
Dalam kurun waktu 2020-2024, KPKNL Kisaran mempunyai arah kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara, piutang dan lelang secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya visi dan misi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Arah kebijakan dan strategi KPKNL Kisaran tahun 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan social adalah:
  - Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
  - Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, social,

- dan lainnya.
- b. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal.
  - c. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas.
  - d. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:
    - Organisasi dan SDM yang optimal;
    - Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
    - Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
    - Komunikasi public yang efektif.

## B. Perjanjian Kinerja

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, perjanjian kinerja dirumuskan dalam sasaran strategi KPKNL Kisaran Tahun 2024 yang tertuang dalam bentuk peta strategi KPKNL Kisaran.



Gambar 2.1  
Peta Strategi KPKNL Kisaran 2024

Berdasarkan *Strategy Map* Kemenkeu-Three, KPKNL Kisaran pada tahun 2024 menerapkan 4 perspektif, 11 Sasaran Strategis (SS) dengan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini merupakan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran beserta target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024.

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja KPKNL Kisaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Utama	Target
Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%
	1b-CP	Indeks integritas organisasi	89,17
Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71,5%
	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86,5%
Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%
	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100%
Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
	5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	71%
	6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89%
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16%
	7b-N	Persentase Capaian Hasil Survei Data Properti	100%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	85
	8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
Pengelolaan keuangan	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan	100

yang akuntabel		anggaran	
	9b-CP	Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10
	9c-N	Tingkat Penguatan manajemen BMN dan Pengadaan	100%
Komunikasi publik yang efektif	9a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	9a-CP	Indeks efektivitas UKI	82

### 1. Stakeholder

Merupakan perspektif yang berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. Dalam perspektif ini terdapat 1 sasaran strategis :

**Sasaran Strategis 1 : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan**

Berdasarkan Pasal 28, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, salah satu ruang lingkup pengelolaan kekayaan negara adalah pengelolaan barang milik negara (BMN). Kegiatan pengelolaan kekayaan negara meliputi: perencanaan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengawasan, dan pengendalian atas BMN, Pengelolaan kekayaan negara dikatakan akuntabel dan produktif apabila: 1). Aset tetap terutilisasi sepenuhnya (zero idle) 2). Adanya nilai tambah BMN berupa penghematan biaya (cost saving) dan PNBPN (revenue generating). 3) Adanya nilai tambah piutang negara berupa PNBPN 4). Adanya manfaat ekonomi (selain cost saving dan revenue), sosial, dan lingkungan atas pengelolaan aset. Misal diukur dengan monetisasi dampak pembangunan aset bagi masyarakat. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.2  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.1

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	%	100
1.2. Indeks integritas	%	80

### 2. Customer Perspective

**Sasaran Strategis 2 : Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa**

Kegiatan Pengelolaan Kekayaan yang memenuhi harapan pengguna jasa merupakan

upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pengguna jasa serta ketetapan penyampaianya untuk mengimbangi harapan konsumen ketika menggunakan layanan kekayaan negara.

Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.3  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.2

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	%	71,5
1.2. Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	%	86,5

### Sasaran Strategis 3 : Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Tata kelola yang optimal adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna terkait pengelolaan piutang negara dan lelang. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.4  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.3

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Persentase realisasi pokok lelang	%	100
1.2. Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	%	100

### Sasaran Strategis 4 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN. Sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.5  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.4

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	Indeks	75

### 3. Internal Process Perspective

Berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah :

#### Sasaran Strategis 5 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

Pengelolaan kekayaan negara merupakan serangkaian proses manajemen tata kelola kekayaan negara yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang efektif adalah tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.6  
IKU KPKNL Kisaran SS. 5

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	%	100
1.2. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	%	100

#### Sasaran Strategis 6 : Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif

Tata kelola merupakan serangkaian proses manajemen yang harus dilakukan untuk menjamin terwujudnya efisiensi penggunaan sumber daya, akuntabilitas proses bisnis, dan efektifitas tercapainya tujuan organisasi. Siklus tersebut diantaranya meliputi perencanaan, penatausahaan, pengamanan, pengelolaan strategi, pemindahtanganan, pengawasan, dan pengendalian. Tata kelola yang produktif dibidang piutang negara dan lelang dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan kaidah tata kelola yang baik (good governance) serta tunduk pada peraturan yang berlaku dan memberikan hasil yang tepat guna. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.7.  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.6

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	%	71
1.2. Persentase produktivitas lelang	%	89

#### Sasaran Strategis 7 : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

Penilaian yang Akuntabel dan Profesional adalah pelaksanaan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi prinsip penilaian. Penilaian yang akuntabel dan profesional ditandai dengan hasil penilaian yang dapat digunakan dengan baik dalam rangka Pengelolaan BMN. Penilaian yang Profesional menunjukkan bahwa Penilaian yang dilakukan oleh Penilai/Tim Penilai ahli sesuai bidangnya dalam menghasilkan penilaian yang memiliki kualitas tinggi. Pelaksanaan penilaian yang akuntabel ditunjukkan dengan dapat dipertanggungjawabkannya hasil penilaian melalui ketergunaannya dalam keputusan Pengelolaan BMN. Sasaran strategis ini terdiri dari 2 (dua) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.8.  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.7

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	%	16
1.2. Persentase Capaian Hasil Survei Data Properti	%	100

#### 4. Learning and Growth Perspective

Berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Adapun sasaran strategis dalam perspektif ini adalah sebagai berikut:

#### Sasaran Strategis 8 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif merupakan merupakan langkah mewujudkan mekanisme pengelolaan kinerja baru yang lebih dinamis dan kolaboratif untuk mewujudkan kinerja pegawai yang lebih optimal dan efisien dalam bidang organisasi dan SDM yang berfokus pada organisasi yang *fit to purpose* SDM yang profesional. Sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.9  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.8

Indikator Kinerja	Satuan	Target
-------------------	--------	--------

1.1.	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko	Indeks	85
1.2.	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	%	90

### Sasaran Strategis 9 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Penguatan pengelolaan keuangan yang kuatitasnya tercermin dari opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan. Selain itu, sasaran ini juga meliputi pengelolaan BMN secara optimal melalui pemanfaatan seluruh BMN Kemenkeu secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Sasaran strategis ini terdiri dari 3 (tiga) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.10.  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.9

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Indeks	100
1.2.	Deviasi data PNBFP Fungsional DJKN	%	10
1.3.	Tingkat Penguatan manajemen BMN dan Pengadaan	%	100

### Sasaran Strategis 10 : Komunikasi publik yang efektif

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan. Adapun kewajiban yang dimiliki oleh pelaksana PPID DJKN (PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III) adalah penyampaian informasi publik, pelaporan pengelolaan layanan informasi publik, dan penunjukan petugas pengelola layanan informasi publik. Dalam penyampaian informasi publik, pengelola layanan informasi publik pada Kanwil DJKN/KPKNL perlu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan unit teknis pemilik data sesuai dengan permintaan informasi yang diajukan dari pemangku kepentingan. Adapun jangka waktu penyampaian informasi publik ditentukan sebagaimana amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PMK Nomor 110 Tahun 2022. Sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.11.  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.10.

	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1.	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	Indeks	80

### Sasaran Strategis 11 : Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan salah satu instrumen penting

dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance). Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kemenkeu dicerminkan antara lain melalui persepsi atas integritas organisasi, pemenuhan kriteria zona integritas - wilayah bebas korupsi, dan pencapaian nilai maturitas penyelenggaraan SPIP yang baik. Sasaran strategis ini terdiri dari 1 (satu) IKU sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.12.  
IKU KPKNL Kisaran pada SS.11

Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.1. Indeks efektivitas UKI	Indeks	82

### C. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2024, KPKNL Kisaran berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

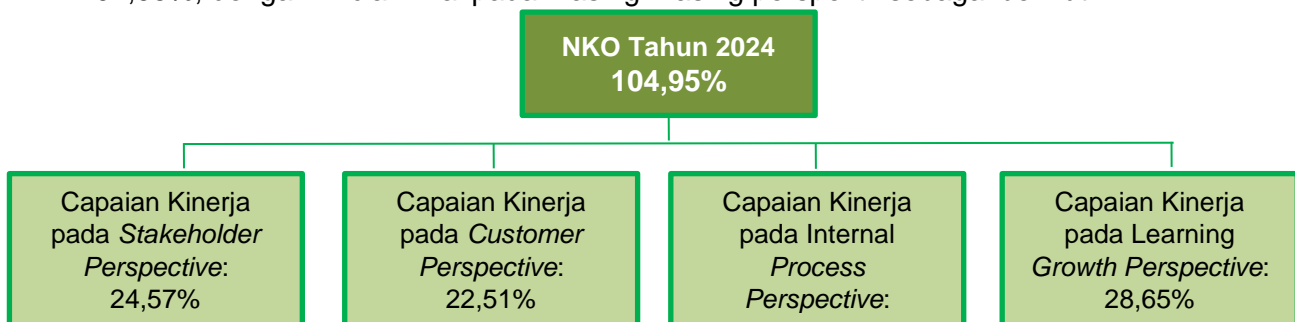
1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
  - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai capaian kinerja KPKNL Kisaran pada tahun 2024, yang dilengkapi dengan penjelasan/narasi tentang target, realisasi dan evaluasi untuk masing-masing IKU. Kemudian akan diuraikan juga mengenai alokasi dan sumber pembiayaan beserta realisasi anggaran untuk membiayai program yang dijalankan, yang disertai dengan penjelasan mengenai realisasi anggaran.

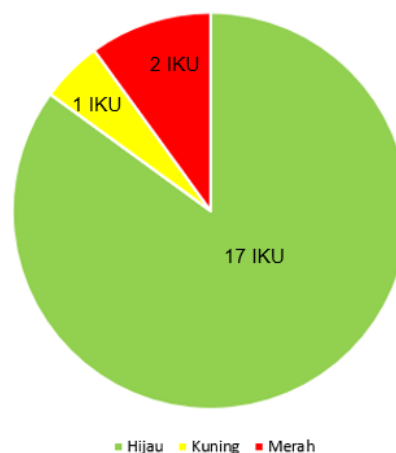
### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja KPKNL Kisaran tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran tahun 2024 adalah sebesar 104,95%, dengan rincian nilai pada masing-masing perspektif sebagai berikut :



Gambar 3.1  
Capaian NKO KPKNL Kisaran Tahun 2024 per perspektif

Selama tahun 2024, dari total 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) KPKNL Kisaran, terdapat 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning sebagaimana pada gambar 3.2.



Gambar 3.2  
Diagram capaian IKU KPKNL Kisaran

Berikut penjelasan dari setiap capaian IKU yang merupakan evaluasi dan analisis kinerja atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicapai KPKNL Kisaran pada tahun 2024 sesuai dengan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three* KPKNL Kisaran.

1. **(1a-CP) Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**
2. **1b-CP) Indeks integritas**
3. **(2a-CP) Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan standar barang dan standar kebutuhan**
4. **(2b-CP) Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN**
5. **(3a-CP) Persentase realisasi pokok lelang**
6. **(3b-CP) Persentase penurunan outstanding piutang negara**
7. **(4a-CP) Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian**
8. **(5a-CP) Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan**
9. **(5b-CP) Persentase evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)**
10. **(6a-CP) Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN**
11. **(6b-CP) Persentase Produktifitas lelang**
12. **(7a-CP) Deviasi ketergunaan hasil penilaian**
13. **(7b-N) Persentase Capaian Hasil Survei Data Properti**
14. **(8a-CP) Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko**
15. **(7a-N) Persentase pengembangan kompetensi pegawai**
16. **(8a-CP) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran**
17. **(9b-CP) Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN**
18. **(9c-N) Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan**
19. **(10a-CP) Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**
20. **(11a-CP) Indeks efektivitas UKI**

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 3 komponen sebagai berikut: Komponen Pengungkit (Bobot 25%), Komponen Proses (25%), dan Komponen Hasil (Bobot 50%).

Tabel 3.31.  
Rincian Target Dan Realisasi  
Indeks efektivitas UKI Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Indeks efektivitas UKI	82	99,10	120,85%

## B. Realisasi Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan

anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Tabel 3.32  
Rincian Jenis Belanja dan Anggaran Tahun 2024

Keterangan	Jenis Belanja			Total
	Pegawai	Barang	Modal	
Pagu	Rp -	Rp 2.050.832.000	Rp 2.530.528.000	Rp 4.581.360.000
Realisasi	Rp -	Rp 1.855.088.913	Rp 2.492.933.291	Rp 4.348.022.204
Persentase	0,00%	90,46%	98,51%	94,91%
Sisa	Rp -	Rp 195.743.087	Rp 37.594.709	Rp 129.307.846

Tabel 3.33  
Rincian Target dan Realisasi Capaian Output Tahun 2024

Kode	Rincian Output	Volume Rincian Output	
		Target 2024	Realisasi 2024
<b>015.CD</b>	<b>Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>		
4796.AEF.001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	35	70
4796.AEF.002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	35	70
4798.AAH.001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	60	63
4798.AAH.002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	10	19
4798.BAH.001	Risalah Lelang	350	703
4798.FAE.004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	1	2
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian	1	1
4798.FAE.301	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PU)	29	410
4798.ABA.002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	92	92
4798.ABA.003	Rekomendasi Hasil Kajian Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	548	548
4798.FAE.005	Rekomendasi Hasil Penilaian		
	- <i>Survei Basis Data</i>	1	1
4798.FAK.001	Aset BUN yang Dikelola		
	- <i>BMN Idle</i>	0	0
	- <i>ABMAT/PPA/BDL</i>	2	2
4796.AEF.003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	60	120
4798.FAE.007	Penggalian Potensi Lelang	2	8
<b>015.WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
4700.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	20	20
4701.EBA.002	Kerumahtanggaan	12	12
4702.BMB.001	Pembinaan/Edukasi Publik	25	50
4702.BMB.002	Kehumasan	1	1
4702.BMB.003	Pameran/Eksibisi	1	1
4704.EBD.001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	5	5

## BAB IV PENUTUP

Secara keseluruhan capaian kinerja atas 9 Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kemenkeu *Three* KPKNL Kisaran Tahun 2024 memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 104,95%. Grafik pada gambar 4.1 berikut menggambarkan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Kisaran dalam kurun tahun 2020 s.d. 2024.



Gambar 4.1  
Grafik Perbandingan NKO KPKNL Kisaran Tahun 2020 s.d. 2024

Dari sisi target yang dibebankan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan dari sisi sifat target juga lebih *challenging*. Dalam hal ini, KPKNL Kisaran selain selalu berupaya meningkatkan kinerja organisasi tidak hanya dari sisi kuantitas, namun juga upaya mewujudkan peningkatan kinerja organisasi dari sisi kualitas pekerjaan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Sebagai unit vertikal DJKN, KPKNL Kisaran selalu berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dengan menghadapi permasalahan dan kendala/hambatan. Dalam rangka menghadapi tantangan, hambatan dan permasalahan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024, masing-masing seksi/subbagian umum telah menyusun *mapping* dan *action plan*.

Seluruh informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan kinerja KPKNL Kisaran atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada KPKNL Kisaran selama tahun 2024. Laporan Kinerja KPKNL Kisaran tahun 2024 diharapkan mampu menjadi bahan refleksi, koreksi, evaluasi sekaligus motivasi untuk memperbaiki area tugas fungsi yang belum optimal serta peningkatan area tugas fungsi yang selama ini telah baik dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja KPKNL Kisaran di periode yang akan datang, sehingga peran dan keberadaan KPKNL Kisaran dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui penyediaan layanan berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

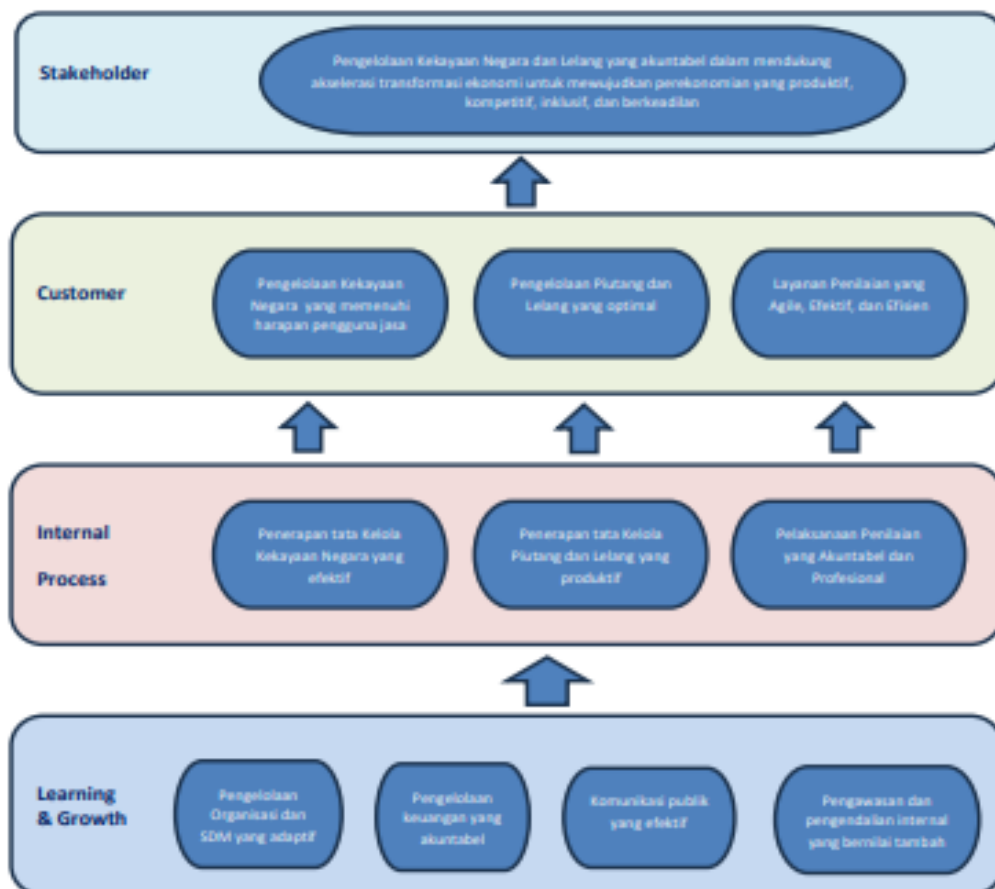
# LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA  
NOMOR : PK-03/WKN.02/2024**

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2024**

**PETA STRATEGI**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN  
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan	1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100 (Rp8.651 Juta)
		1b-CP	Indeks Integritas	89,17
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	71.5
		2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	86.5
3	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100 (Rp93.000 Juta)
		3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100 (Rp180 Juta)
4	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75
5	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipkatkan	100
		5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100
6	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	89 (41 BKPN)
		6b-CP	Persentase produktivitas lelang	89
7	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16
		7b-N	Persentase Capaian Hasil Survei Data Properti	100
8	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	8a-CP	Indeks Kualitas manajemen kinerja dan risiko	85
		8b-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	90
9	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	9a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100
		9b-CP	Persentase Deviasi data PNBPN Fungsional DJKN	10
		9c-N	Tingkat penguatan manajemen BMN dan pengadaan	100
10	Komunikasi publik yang efektif	10a-CP	Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80
11	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah	11a-CP	Indeks efektivitas UKI	82

Program/Kegiatan	Anggaran
<b>Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko</b>	<b>Rp323,636,000.00</b>
1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	Rp22,864,000.00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	-
3. Pengelolaan Aset	Rp300,772,000.00
4. Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	-
5. Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	-
6. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	-
<b>Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp4,247,204,000.00</b>
1. Legislasi dan Litigasi	Rp 22,088,000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp4,190,096,000.00
3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp20,000,000.00
4. Pengelolaan Organisasi dan SDM	-
5. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	Rp15,020,000.00
6. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi	-

Pegawai yang Dinilai



Ditandatangani Secara Elektronik  
**Agus Budianta**  
 NIP 197608031999031002

Jakarta, 30 Januari 2024  
 Pejabat Penilai Kinerja



Ditandatangani Secara Elektronik  
**Dodok Dwi Handoko**  
 NIP 197508151995031001

**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN  
KANTOR WILAYAH DJKN SUMATERA UTARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
<b>1</b>	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan							
	1a-CP	Persentase Realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100	100	100	100	100	100
	1b-CP	Indeks Integritas	-	-	-	-	-	89,17
<b>2</b>	Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	2a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50	50	60	60	71.5
	2b-CP	Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN	-	45	45	-	45	86.5
<b>3</b>	Pengelolaan Piutang dan Lelang yang optimal							
	3a-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100	100	100	100	100	100
	3b-CP	Persentase penurunan outstanding Piutang Negara	100	100	100	100	100	100
<b>4</b>	Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien							
	4a-CP	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian	75	75	75	75	75	75
<b>5</b>	Penerapan tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif							
	5a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	-	40	40	60	60	100
	5b-CP	Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	10	32	32	80	80	100
<b>6</b>	Penerapan tata Kelola Piutang dan Lelang yang produktif							
	6a-CP	Persentase saldo Berkas Kasus Piutang Negara	96	93	93	91	91	89
	6b-CP	Persentase produktivitas lelang	30	45	45	60	60	89
<b>7</b>	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
	7a-CP	Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian	16	16	16	16	16	16
	7b-N	Persentase capaian hasil survei data properti	10	30	30	50	50	100
<b>8</b>	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	8a-CP	Indeks manajemen kinerja dan risiko	85	85	85	85	85	85

No	SS, IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
	8b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	10	60	60	75	75	90	90
<b>9</b>	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel							
	9a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
	9b-CP Persentase Deviasi data PNBP Fungsional DJKN	10	10	10	10	10	10	10
	9c-N Tingkat penguatan manajemen BMN dan pengadaan	30	60	60	80	80	100	100
<b>10</b>	Komunikasi publik yang efektif							
	10a-CP Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
<b>11</b>	Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah							
	11a-CP Indeks efektivitas UKI	-	-	-	-	-	82	82

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara  
Dan Lelang Kisaran,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Agus Budiarta